



# Kisruh APBD DKI Pembangunan Sekolah Mangkrak, Siswa Jadi Korban

**JAKARTA** — Siswa-siswa SMKN 2 Jakarta Pusat belajar dengan menggunakan ruangan SDN Kenari 07-12 sejak tiga tahun lalu. "Bayangkan, kami bertukar belajar dengan siswa sekolah dasar," kata Kelapa Subbagian Tata Usaha SMKN 2 Jakarta Ariman kemarin.

Ariman mengatakan proses belajar sebanyak 565 siswa dari lima jurusan SMKN 2 terpaksa pindah karena renovasi gedung sekolah pada 2013 dihentikan tahun lalu. Pihak sekolah telah menanyakan hal tersebut kepada bagian sarana dan prasarana pendidikan Jakarta Pusat. Namun hingga kini belum mendapatkan penjelasan yang resmi mengenai penghentian itu. "Tidak tahu mengapa masuk tahap dua, tahun lalu, malah berhenti," ujarnya.

Padahal, kata Ariman, pelajaran untuk siswa sekolah kejuruan didominasi oleh kegiatan praktik. Mereka hanya bisa menggunakan ruangan aula secara bersamaan, bahkan halaman masjid. Saat disinggung mengenai *uninterruptible power supply* (UPS) yang diterima beberapa sekolah, Ariman hanya geleng-geleng kepala. "Boro-boro UPS, gedung saja tidak dibangun."

Hal yang sama dialami oleh siswa SMA 55 Jakarta Selatan yang sudah 2,5 tahun menumpang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara. Kepala SMA 55 Kartono mengatakan proyek sekolah ini mangkrak karena baru Rp 6 miliar dana renovasi yang cair dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2013. Padahal keseluruhan dana yang dibutuhkan mencapai Rp 24 miliar. "Kekurangan Rp 18 miliar, baru dianggarkan lagi di APBD DKI 2015," ujarnya.

Kepala Sudin Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan, Budiana, mengatakan penyebab mangkraknya pembangunan

sekolah ialah anggaran rehab total sekolah pada 2012-2014 tidak masuk APBD. "Seharusnya bisa selesai 2014, tapi tak lolos saat pembahasan APBD," kata dia Selasa lalu.

Namun Budi memastikan tahun ini renovasi sekolah tersebut dapat dimulai kembali karena sudah masuk APBD. Dia berharap proses APBD dapat berjalan lancar, sehingga pembangunan sarana sekolah yang sangat dibutuhkan para siswa dapat segera terlaksana. "Ya, semoga cepat cair," tuturnya.

Pengamat Pendidikan Jakarta Education Center, Amich Alhumami, mengatakan Pemerintah DKI lebih baik fokus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah, seperti memperbaiki gedung yang rusak ataupun membuat kelas nyaman bagi siswa dibanding membuat program pengadaan UPS bagi sekolah. "UPS bukan kebutuhan mendasar bagi sekolah," katanya ketika dihubungi *Tempo* Senin lalu.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kata Amich, Pemerintah DKI juga bisa mengadakan program yang lebih bermanfaat dibanding memberikan UPS, seperti menyediakan buku-buku pelajaran dan melengkapi fasilitas laboratorium. "Kalau kebutuhan dasar saja tak terpenuhi, proses pendidikan yang berkualitas tak terwujud," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan terhambatnya proyek fisik di Ibu Kota merupakan efek tak terelakkan dari kisruh APBD 2015. Salah satu contohnya ialah pembangunan sekolah-sekolah di Ibu Kota. "Tak ada solusinya, harus menunggu APBD 2015 selesai," kata Ahok—sapaan akrab Basuki—pekan lalu.

● JAVADI SUPRIADIN | RAYMUNDUS RIKANG |  
GANGSAR PARIKESIT | NINIS CHAIRUNISSA | LINDA  
HAIRANI